



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026, sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
6. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah mempunyai tujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan terhadap program dan kegiatan yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2026.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah meliputi:

- a. bab I berisi pendahuluan yang mengemukakan gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b. bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.
- c. bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, tujuan, dan sasaran serta program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.
- e. bab V berisi penutup.

BAB V

ISI DAN URAIAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 83 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Tuban.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2022 Seri E Nomor 67);
23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 13).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban tahun 2026 ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini adalah:

- a) Memberikan arahan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2026;
- b) Dengan perencanaan kerja yang jelas dan sistematis, maka satuan kerja akan bergerak secara konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif serta memiliki arahan dan fokus yang jelas yang akan mempermudah pencapaian tujuan satuan kerja;
- c) Menjadi alat ukur yang pasti atas hasil pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dituangkan dalam bentuk pelaporan;
- d) Sebagai alat pacu peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mempermudah pembinaan dan pendayagunaan aparatur;
- e) Sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 88,74 % sebagai berikut :

ANGGARAN TAHUN 2024			
APBD	P-APBD	REALISASI	+/-
9.663.153.952	13.144.195.802	11.663.583.732	1.480.612.070

ANGGARAN TAHUN 2025			
APBD	P-APBD	REALISASI S/D JUNI 2024	+/-
13.932.766.580	12.267.830.114	2.971.402.193	1.664.936.466

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban sampai dengan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tuban

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		82	81,1	81.35	81,1	100%	81.35	243	61%
1	05	01	2	01		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
1	05	01	2	01	0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi	6 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	01	0006	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1	05	01	2	01	0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil evaluasi, Pelaporan, dan Publikasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1	05	01	2	02		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	9 Laporan	9 Laporan	100%
1	05	01	2	02	0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang menerima Gaji dan Tunjangan	39 Orang	35 Orang	39 Orang	39 Orang	100%	35 Orang	39 Orang	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	02	0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen dan Jumlah administrasi Keuangan yang disediakan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
1	05	01	2	02	0005	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen dan Jumlah administrasi Keuangan yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%
1	05	01	2	02	0007	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen dan Jumlah administrasi Keuangan yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	02	0008	- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen dan Jumlah administrasi Keuangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	05	01	2	06		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Jasa	5 Layanan	6 Jasa	5 Layanan	100%	6 Jasa	6 Jasa	100%
1	05	01	2	06	0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2	06	0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	06	0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	12 Paket	4 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
1	05	01	2	06	0005	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Peralatan Perkantoran	12 Paket	2 Jenis	12 Paket	12 Paket	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
1	05	01	2	06	0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	05	01	2	06	0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	100%	50 Laporan	50 Laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	07		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6 Unit	1 Unit	6 Unit	1 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
						- Pengadaan Mebel		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	01	2	08		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 Jasa	5 Jasa	5 Jasa	5 Jasa	100%	5 Jasa	5 Jasa	100%
1	05	01	2	08	0001	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%
1	05	01	2	08	0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01	2	08	0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Jasa	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Jasa	5 Jasa	100%
1	05	01	2	09		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
1	05	01	2	09	0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	100%	35 Unit	35 Unit	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
1	05	01	2	09	0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
1	05	01	2	09	0009	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		77%	77%	77%	77%	100%	77%	-	0%
								100%	100%	100%	100%		100%		100%
								100%	100%	100%	100%		100%		100%
1	05	03	2	01		1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupten/Kota									

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	01	0003	- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	1 (Dokumen)	-	-	100%	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)	100%
1	05	03	2	01	0004	- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Ko ta yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai	-	600 (orang)	-	-	100%	600 (orang)	600 (orang)	100%

[illegible]

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	02	0017	- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Ko ta	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1	05	03	2	02	0015	- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	114 Unit	124 Unit	114 Unit	114 Unit	100%	124 Unit	124 unit	100%

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	02	0006	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	131 Kawasan	151 Kawasan	131 Kawasan	131 Kawasan	100%	151 Kawasan	151 Kawasan	100%
1	05	03	2	04		3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	05	03	2	04	0010	- Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana	-	12 Kegiatan	-	-	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%

[illegible]

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (TW II tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	03	2	03	0003	- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2	03	0009	- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik bagi korban bencana	500 Paket	1000 Paket	500 Paket	500 Paket	100%	1000 Paket	1000 Paket	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pemantapan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 - 2030. Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan risiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi di bidang penanganan darurat bencana diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumber daya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Pemantapan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diarahkan pada penggerakan sumber daya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	Indeks Kapasitas Daerah	-	-	0,51	0,55	0,59	0,63	0,51	-	0,59	0,63	- Tahun 2020 Mengacu IRB BNPB Tahun 2018 - Tahun 2021 - 2026 mengacu IRB BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
			Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terlaksana dengan baik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
			sah/legal									
			Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	-	0,017 %	0,017%	Terlaksana dengan baik
			Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terlaksana dengan baik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
			Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terlaksana dengan baik
			Prosentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	-	100 Orang	100 Orang	Terlaksana dengan baik
			Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	-	100 Orang	100 Orang	Terlaksana dengan baik
			Persentase (%) jumlah Warga	0,048%	0,048 %	0,050 %	0,053 %	0,046 %	-	0,050 %	0,053 %	Terlaksana dengan baik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
			Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana									
			Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum pernah Melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Perlindungan
			Persentase kecepatan respon kurang	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terealisasi dengan baik

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
			dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)									
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terealisasi dengan baik
			Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terealisasi dengan baik
			Persentase (%) jumlah korban	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Terealisasi dengan baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pencapaian target kinerja merupakan hal yang krusial mengingat peran perangkat daerah sebagai pemegang kewenangan teknis roda pemerintahan bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan konsep negara demokrasi, rakyat atau warga negara adalah pemegang saham dari negara sehingga mereka memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan optimal yang terbaik dari pemerintah selaku pihak yang diberikan *mandatory* untuk melaksanakan kewajiban negara terhadap rakyatnya. Untuk itu telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan kewajiban pemerintah dan hak rakyat akan pelayanan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sub urusan bencana terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Adapun ketiga standar tersebut adalah:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, dengan target capaian 100%;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target capaian 100%;
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan indikator pencapaian: Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan target capaian 100%.

Dari ketiga Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana tersebut realisasi capaian targetnya pada tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban telah mencapai target yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun tercapainya target dimaksud masih diperlukannya dukungan anggaran serta penambahan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Dukungan anggaran seperti yang telah disebutkan di awal tadi, menjadi krusial mengingat upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dimaksud membutuhkan dana yang tidak

sedikit. Sebagai contoh, untuk mewujudkan indikator pencapaian bagi Pelayanan Informasi Rawan Bencana diperlukan anggaran untuk penyusunan Kajian Risiko Bencana meliputi anggaran untuk tenaga ahli, rapat-rapat, dan diskusi publik sampai dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tersebut menjadi sah/legal. Kemudian untuk melakukan aktivitas penyampaian hasil kajian risiko bencana tersebut perlu anggaran untuk sosialisasi baik secara tatap muka (*offline*) maupun secara *online* melalui media sosial dan media massa. Selain itu diperlukan pemasangan rambu-rambu rawan bencana, rambu evakuasi, dan papan informasi publik. Semua aktivitas tersebut haruslah dapat mencakup seluruh warga negara yang bermukim di wilayah rawan bencana. Semakin besar wilayah rawan bencana maka semakin besar pula anggaran yang harus disediakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal tersebut. Persoalan yang kedua adalah menyangkut kapasitas sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban yang sampai saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas masih jauh dari kebutuhan karena belum ada standar kompetensi yang ditetapkan bagi aparatur pelaksana perangkat daerah yang mampu sub urusan bencana. Penanggulangan bencana adalah hal yang kompleks yang membutuhkan multi disiplin ilmu, minat yang tinggi, dan pengalaman yang memadai untuk dapat optimal dalam melaksanakan manajemen penanggulangan bencana.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana;
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / *Early Warning System* (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi;
3. Belum tersedianya rencana kontingensi penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan komprehensif.

Adapun isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tuban saat ini adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Secara Terpadu;
2. Peningkatan Efektivitas Mitigasi Bencana;
3. Belum Maksimalnya Sistem Informasi dan Komunikasi dalam Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk Pencegahan, Kedaruratan dan Pasca Bencana;
5. Penanganan Tahap Pascabencana Masih Perlu Ditingkatkan Kualitasnya;
6. Target Respon Time yang belum terpenuhi.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pepaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.
2. Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal:

Selanjutnya perlu juga untuk disampaikan bahwa dalam upaya manajemen bencana ke depan perlu dilakukan penyesuaian dalam kebijakan dan strategi penanggulangan bencana merujuk kepada

Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang ditelaah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 – 2044 dan penjabarannya melalui Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020 – 2044. Adapun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Kabupaten
Tuban Tahun 2025 – 2029

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan dan Data Kebencanaan	Penguatan pondasi awal kelembagaan dan sistem data kebencanaan yang andal sebagai dasar pengambilan kebijakan penanggulangan bencana.
2.	Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana	Penguatan kesiapsiagaan dengan sistem peringatan dini dan strategi mitigasi yang adaptif dan terintegrasi.
3.	Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen Tanggap Darurat Berbasis Inklusi	Peningkatan kemampuan respon darurat yang cepat dan inklusif, dengan fokus pada perlindungan kelompok rentan
4.	Penguatan Ketangguhan Komunitas dan Rehabilitasi Pemulihan Berbasis Inklusif	Penguatan kapasitas komunitas dalam proses pemulihan pasca bencana secara berkelanjutan dan inklusif.
5.	Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah menuju Indonesia Emas 2045	Pemberdayaan melembagakan ketangguhan bencana ke dalam seluruh aspek pembangunan daerah demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.

2.4. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD

RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban. Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Tuban

C	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,95	9.650.971.232	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	82,95	9.650.971.232	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	194.344.620	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	194.344.620	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	5.564.563.492	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	9 Dokumen	5.564.563.492	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian (Layanan)	2 Layanan	5.297.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian (Layanan)	2 Layanan	5.297.000	
4	Administrasi	Kab.	Jumlah Jenis	4 Jenis	195.176.909	Administrasi Umum	Kab.	Jumlah Jenis	4 Jenis	195.176.909	

C	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Umum Perangkat Daerah	Tuban	Layanan Pengadaan Administrasi Umum			Perangkat Daerah	Tuban	Layanan Pengadaan Administrasi Umum			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	4 Jenis	2.828.909.600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	4 Jenis	2.828.909.600	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	320.042.530	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	2 Jenis	320.042.530	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	3 Jenis	542.637.081	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tuban	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	3 Jenis	542.637.081	
II	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Tuban	Persentase Wilayah Dengan Kesiapsiagaan Bencana Yang Sesuai Standar	30,49%	3.260.936.590	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Tuban	Persentase Wilayah Dengan Kesiapsiagaan Bencana Yang Sesuai Standar	30,49%	3.260.936.590	
			Nilai Komponen Peningkatan	0,55				Nilai Komponen Peningkatan	0,55		

C	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah					Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah			
			Nilai Komponen Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	0,59				Nilai Komponen Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	0,59		
			Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	0,47				Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	0,47		

C	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Prosentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	0,00077 %	101.980.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tuban	Prosentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	0,00077 %	101.980.000	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tuban	Prosentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,056%	1.457.957.436	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tuban	Prosentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,056%	1.457.957.436	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tuban	Prosentase Keberhasilan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	886.460.794	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tuban	Prosentase Keberhasilan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100%	886.460.794	
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tuban	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca	50 Kegiatan	814.538.360	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tuban	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca	50 Kegiatan	814.538.360	

C	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bencana yang tertangani					Bencana yang tertangani			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tuban terdapat 3 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan penanggulangan bencana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tuban setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Tuban

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
			NIHIL		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana;
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana;
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tuban juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) ke 7, yaitu **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik** melalui fokus agenda pembangunan **Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana**. Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat;
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebaran peringatan dini bencana;
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2025-2029, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Tuban adalah Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam rangka penurunan Indeks Risiko Bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029. Sasaran BPBD Kabupaten Tuban adalah menurunnya tingkat resiko bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Tuban periode 2025 - 2030 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penanggulangan Bencana

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Tabel 3.3
Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Kebutuhan Dana

PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	KET
(1)		(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	9.650.971.232	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	194.344.620	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	5.546.563.492	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian (Layanan)	5.297.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	195.176.909	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	2.828.909.600	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	320.042.530	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	542.637.081	

PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	KET
(1)		(2)	(3)	(4)
	Pemerintahan Daerah			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Wilayah Dengan Kesiapsiagaan Bencana Yang Sesuai Standar	3.260.936.590	
		Nilai Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah		
		Nilai Komponen Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah		
		Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	101.980.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.457.957.436	

PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	KET
(1)		(2)	(3)	(4)
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Keberhasilan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	886.460.794	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	814.538.360	

Tabel 3.4

Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026

SASARAN KEPALA OPD		INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1		2	3			4	5		6	7
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	Rp 194.344.620 Rp 105.381.860 Rp 88.962.760
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.2 Penyediaan Administrasi	Jumlah Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun (Dokumen)	Rp 5.564.563.492 Rp 5.498.316.142 Rp 56.967.000

SASARAN KEPALA OPD	INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3		4	5	6	7
					Pelaksanaan Tugas ASN 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD		Rp 9.280.350
					3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian (Layanan)	Rp 5.297.000 Rp 5.297.000

SASARAN KEPALA OPD	INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3		4	5	6	7
					Daerah 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.2 Pengadaan Mebel 5.3 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp 98.885.000 Rp 2.400.000.000
					6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Rp 320.042.530 Rp 100.572.000 Rp 219.470.530

SASARAN KEPALA OPD		INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1		2	3			4	5		6	7
								Kantor		
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Rp 542.637.081
								7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp 469.035.340
								7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp 33.871.500
								7.3 Pemeliharaan/Reha		Rp 39.730.241

SASARAN KEPALA OPD		INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1		2	3		4	5		6	7
							bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Meningkatny a Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	2 Program Penanggulangan Bencana	Meningkatny a Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Sesuai Ketentuan	Persentase Wilayah Dengan Kesiapsiagaan Bencana Yang Sesuai Standar	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 1.2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Prosentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	Rp 101.980.000 Rp 86.588.000 Rp 15.392.000
					Nilai	2	Pelayanan Pencegahan	Prosentase	Rp 1.457.957.436

SASARAN KEPALA OPD	INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3		4	5	6	7
				Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2.1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2.2 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2.3 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 2.4 Pengendalian Operasi dan	Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 1.247.277.100 Rp 65.160.000 Rp 30.000.000 Rp 46.980.000 Rp 68.540.336

SASARAN KEPALA OPD		INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1		2	3			4	5		6	7
								Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2.5 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
					Meningkatny a Penanganan Kedaruratan Bencana yang Sesuai Standar	Nilai Komponenen Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana Pada	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 3.1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Keberhasilan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 886.460.794 Rp 442.057.374 Rp 444.403.420

SASARAN KEPALA OPD		INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1		2	3			4	5		6	7
						Indeks Ketahanan Daerah		Kabupaten/Kota 3.2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		
					Meningkatny a Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Nilai Komponen Pengembang an Sistem Pemulihan Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 4.1 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 4.2 Koordinasi penanganan Pascabencana	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	Rp 814.538.360 Rp 36.165.860 Rp 772.950.000 Rp 5.422.500

SASARAN KEPALA OPD		INDIKATOR KINERJA KEPALA OPD	PROGRAM		SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN
1		2	3			4	5		6	7
								Kabupaten/Kota 4.3 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban pada Tahun 2026 sejumlah 2 Program dengan 11 kegiatan :

- I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan untuk menunjang administrasi umum serta kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Sumber pendanaan seluruh kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.

Adapun program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026
dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2027
Kabupaten Tuban

Badan Penanggulangan Bencana Daerah								Lembar 1 dari 5		
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana TA. 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana TA. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kab. Tuban	82,95	9.650.971.232	APBD		83,7	11.254.000.000
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun (Dokumen)	Kab. Tuban	9 Dokumen	194.344.620	APBD		9 Dokumen	200.000.000
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tuban	41 Orang /bulan	5.564.563.492	APBD		9 Dokumen	6.322.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana TA. 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana TA. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian (Layanan)	Kab. Tuban	2 Layanan	5.297.000	APBD		2 Layanan	2.500.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Kab. Tuban	4 Layanan	195.176.909	APBD		4 Jenis	304.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan BMD	Kab. Tuban	4 Unit	2.828.909.600	APBD		4 Jenis	3.670.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Kab. Tuban	2 Jasa	320.042.530	APBD		2 Jenis	305.000.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD	Kab. Tuban	3 Unit	542.637.081	APBD		3 Jenis	450.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana TA. 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana TA. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Sesuai Ketentuan	Persentase Wilayah Dengan Kesiapsiagaan Bencana Yang Sesuai Standar	Kab. Tuban	30,49%	3.260.936.590	APBD		36,59%	2.931.783.916
			Nilai Komponen Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	Kab. Tuban	0,55		APBD		0,60	
		Meningkatnya Penanganan Kedaruratan Bencana yang Sesuai Standar	Nilai Komponenen Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah	Kab. Tuban	0,59		APBD		0,63	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana TA. 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana TA. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Pemulihan dan Rehabilitasi Pasca Bencana	Nilai Komponen Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Pada Indeks Ketahanan Daerah		0,47				0,52	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	Kab. Tuban	0,00077%	101.980.000	APBD		0,00077%	89.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sesuai ketentuan	Prosentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan	Kab. Tuban	0,056%	1.457.957.436	APBD		0,058%	559.013.336

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana TA. 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana TA. 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Prosentase Keberhasilan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tuban	100%	886.460.794	APBD		100%	701.604.720
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pelayanan Dasar rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Penanganan Pemulihan Kejadian Pasca Bencana yang tertangani	Kab. Tuban	50 Kegiatan	814.538.360	APBD		50 Kegiatan	1.582.165.860

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan satuan kerja. Dengan Renja ini diharapkan Pimpinan SKPD akan menentukan langkah yang berupa kebijakan - kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian.

Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana strategis SKPD belum mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

Demikian penyusunan dokumen terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026 ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TUBAN,

ttd.

SUDARMAJI



BUPATI TUBAN,

ADITYA HALINDRA FARIDZKY